

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Oleh

Tiara Rossa Adira

NIM. 190565201125

Abstrak

Fenomena yang terjadi pada tahun 2022 adanya gesekan antara pemerintah kota Tanjungpinang dengan penyelenggara reklame karena mereka mengatakan selalu membayar pajak, papan reklame yang ditertibkan itu sudah ada yang berdiri hampir 10 tahun. Mereka merugi akibat penyegehan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang No 70 Tahun 2021 tersebut. Pengusaha harus menunda bisnis reklame mereka karena, papan reklame disegel. Penertiban reklame yang berdiri tanpa izin disejumlah titik dikota Tanjungpinang, ternyata 244 konstruksi reklame, hanya sekitar 10 persen saja yang memiliki izin mendirikan persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini memakai penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang, menggunakan teknik, alat pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memakai teori Implementasi kebijakan Van Meter dan van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagian besar sudah berjalan dengan baik yang dilakukan sesuai pasal 49 tentang pengawasan tim penyelenggaraan reklame. Pada pelaksanaannya sesuai pasal 18 ayat 3 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Dinas yang menyelenggarakan izin melaksanakan kebijakan penyelenggara izin sesuai dengan tugasnya. Satuan polisi pamong praja juga sebagai petugas penertiban reklame menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan pasal 51 ayat 4. Temuan dilapangan mengatakan bahwa dalam hal perizinan banyak yang belum mengurus izin konstruksi hanya mengurus izin pemasangan konten dan membayar pajak konten. Penertiban yang terjadi sudah efektif dapat dilihat dari banyaknya reklame yang sudah ditertibkan. Dalam pengurusan izin lebih dimudahkan, dan melibatkan sasaran tujuan atau untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk para pengusaha reklame diharapkan setelah ini mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Reklame, izin, Penertiban, Tim Satuan Tugas

Implementation Of Billboard Policy In The City Of Tanjungpinang In 2022

BY

Tiara Rossa Adira

NIM. 190565201125

Abstract

The phenomenon that occurred in 2022, there is friction between the Tanjungpinang city government and billboard organizers because they say they always pay taxes, billboards that have been put in order have been standing for almost 10 years. If it is illegal, why does the Tanjungpinang City Government continue to receive taxes on advertisements that are deemed illegal. They lost money as a result of the sealing based on the Tanjungpinang Mayor Regulation No 70 of 2021. Entrepreneurs have to put their billboards on hold because, billboards are sealed. Controlling billboards that were erected without permission at a number of points in the city of Tanjungpinang, it turned out that 244 billboards were constructed, only about 10 percent of which had a Building Permit to Establish a Building Approval (PBG). This study aims to look at the implementation of policies for licensing and controlling billboards in the city of Tanjungpinang. This study used descriptive qualitative research with 5 informants, and used data collection techniques and tools in the form of interviews and documentation. This study uses the theory of policy implementation by Van Meter and van Horn. The results showed that the implementation of billboards in Tanjungpinang City was carried out by the billboard organizing team from the implementation of the Investment Service and one-stop integrated services as the agency that administers permits implementing permit organizer policies in accordance with their duties. The civil service police unit as well as billboard control officers carry out their duties in accordance with the authority given. The findings in the field say that in terms of permits, many have not applied for construction permits, only managing content installation permits and paying content taxes. The control that has taken place has been effective as can be seen from the number of billboards that have been disciplined. In obtaining permits it is easier, and involves the objectives or to achieve the objectives of the policy. For advertisement entrepreneurs, it is hoped that after this they will get their rights and carry out their obligations according to applicable regulations.

Keywords: Implementation, Advertising, permits, Controlling, Task Force Team